

Kasus Deposito Bodong Diduga Libatkan Pegawai Pemerintah

SEMARANG — Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Semarang, Wachid Nurmiyanto, menyatakan adanya dugaan korupsi dalam kasus deposito bodong milik pemerintah kota senilai Rp 22,7 miliar. "Diduga ada kerja sama oknum pegawai bank dan pegawai pemerintah kota," ujarnya kemarin.

Kecurigaan itu, kata dia, berawal dari pengubahan bentuk penyimpanan dana pemerintah dari rekening giro menjadi deposito di Bank BTPN. Belakangan, diketahui sertifikat deposito bank itu diketahui palsu. Pemindahbukuan tersebut bisa dilakukan karena ada iming-iming mendapatkan *fee* dari penempatan deposito itu.

Wachid menduga hasil penempatan dana secara ilegal mengalir ke oknum pegawai di bagian kas daerah. Bahkan hasil penyelidikan polisi menemukan bukti adanya percakapan oknum pegawai dengan pegawai bank terkait dengan permintaan *fee*.

Berdasarkan hasil laporan keuangan pemerintah kota pada 2014, bunga bank yang menjadi salah satu pemasukan kas daerah mencapai Rp 15 miliar. Pendapatan itu berasal dari bunga deposito Rp 9 miliar dan giro Rp 6 miliar. "Namun laporan itu hanya dalam bentuk neraca," kata Wachid.

Kepala Kepolisian Resor Kota Semarang Komisaris Besar Djihartono mengatakan pihaknya sudah memeriksa 12 saksi. Dari keterangan saksi, penyidik menemukan modus pembobolan uang pemerintah dengan memalsukan dokumen. "Itu atas dasar penyelidikan dengan mendapatkan bukti-bukti," ujarnya.

Dia membenarkan telah memeriksa barang bukti berupa percakapan dalam pesan BlackBerry dan telepon serta sejumlah tiket pesawat. Namun dia belum bisa mengungkapkan tersangkanya karena menunggu proses penyidikan. "Hasilnya, ada indikasi tindak pidana korupsi dan kejahatan perbankan," katanya.

● EDI FAISOL